

ABSTRAK

Politik Uang menjelang pemilihan umum legislatif kini makin menjadi budaya, pentingnya meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan para calon legislatif untuk menghilangkan kultur ataupun budaya bagi-bagi uang ketika kampanye menjadi salah satu strategi untuk mengurangi budaya tersebut. Permasalahan politik uang menjadi hal serius yang mana akan mengakibatkan KKN (korupsi kolusi nepotisme) apabila terus mengalir disetiap pemilihan umum terjadi. Dengan adanya teori Patron Client, penelitian ini mengkaji bagaimana respon dari masyarakat dan para calon legislatif terkait politik uang yang terjadi di Kota Bandung sebagai Kota Urban atau Kota maju tetapi politik uang tersebut masih terus terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru mengenai kesadaran bagi seluruh masyarakat dan juga calon legislatif mengenai transaksi politik uang di Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya, adanya pemberian bantuan politisi yang mana diterima baik oleh masyarakat karena mereka butuh, hal ini juga dikarenakan pendidikan politik dimasyarakat kurang matang dan adanya kenaikan bahan pokok menjadikan fenomena ini adalah kesempatan emas bagi caleg untuk bagi-bagi bingkisan. Dalam sisi calon legislatif, mereka menganggap bahwasanya untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum legislatif ini apabila hanya menggunakan modal sosial dalam kampanye tidak cukup, adanya modal finansial sebagai pendukung untuk mencapai kemenangan yang mana modal finansial ini digambarkan sebagai transaksi politik uang ketika kampanye pemilihan umum berlangsung. Saran praktisi yang dianjurkan yakni perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan calon legislatif terkait politik uang serta adanya cara lain selain politik uang dalam mencapai kemenangan.

Kata Kunci: Budaya Politik, Politik Uang, Pemilihan Umum Legislatif

ABSTRACT

The practice of money politics leading up to legislative elections has increasingly become a norm. Enhancing political education for both the public and legislative candidates is crucial to eliminate the culture of distributing money during campaigns. Addressing money politics is important as it can lead to corruption, collusion, and nepotism if it persists in every election. Using the Patron-Client theory, this research examines the responses of the public and legislative candidates to money politics in Bandung, a city that, despite its urban advancement, still experiences this issue. The research employs a qualitative method with a phenomenological approach. It aims to provide new insights into the awareness of both the public and legislative candidates regarding money politics in Bandung.

The study finds that political aid given by politicians is well-received by the public due to their needs, compounded by inadequate political education and rising living costs, which make this a golden opportunity for candidates to distribute gifts. On the candidates' side, they believe that winning the legislative election requires not just social capital but also financial resources, which are often represented as money politics during campaigns. The recommended practical advice includes the need for socialization about money politics to the public and candidates and exploring alternative strategies for winning elections beyond money politics.

Keywords: Political Culture, Money Politics, Legislative Elections

